

LAPORAN TRIWULAN - I TAHUN 2022

- LAPORAN KINERJA
- LAPORAN KEUANGAN
- PENGUKURAN KINERJA
- DOKUMENTASI

BKPSDM KABUPATEN SUMENEP



Jalan Dr. Cipto No. 40 Sumenep



Bkpsdm.sumenepkab.go.id



(0328) – 664526



Sekretariat.bkpsdm.sumenep@gmail.com

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Kami menyadari capaian realisasi Triwulan I ini belum memuaskan karena tidak semua indikator kinerja utama dapat direalisasikan sesuai yang diharapkan. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Triwulan I Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 - 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Kabupaten Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2021 – 2026. Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai saran evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang aktivitas dan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep selama satu triwulan, walaupun dengan capaian kinerja Triwulan I yang belum begitu baik. Kami berharap laporan capaian kinerja ini dapat memotivasi kinerja kami untuk lebih baik lagi pada triwulan berikut.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepa pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Triwulan I Tahun 2022.

Sumenep, 15 April 2022

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUMENEP**



ABDUL MADJID, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661108 198809 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.3. Isu Strategis	3
1.4. Dasar Hukum	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Perencanaan Strategis.....	10
2.2. Indikator Kinerja Utama.....	11
2.3. Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	14
3.2. Pengukuran Kinerja atas Perjanjian Kinerja	16
3.3. Akuntabilitas Keuangan.....	20
BAB IV PENUTUP	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerja bisa terus ditingkatkan. Laporan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Triwulan I Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.

Laporan Triwulan Capaian Indikator Kinerja Utama OPD ini dibuat sebagai implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Dalam Laporan Triwulan disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama OPD yang ditetapkan dalam Renja OPD.

Penyusunan Laporan Triwulan ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada

prinsip-prinsip “good governance”. Laporan Triwulan ini juga memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan kewenangan bidang kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia serta tugas pembantuan selama satu triwulan.

Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai Indikator Kinerja Utama serta capaian realisasi anggaran yang dituangkan dalam kegiatan untuk mendukung Indikator Kinerja Utama tersebut. Pertanggungjawaban dimaksud dilakukan melalui pengembangan sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban secara periodik dan melembaga sebagai salah satu persyaratan untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam penetapan Kinerja (PK) Tahunan. Tahun 2022 merupakan tahun Pertama penjabaran Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

Pada tahun 2022, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis sesuai dengan tugas pokok melaksanakan urusan penyelenggaraan kewenangan bidang kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia serta tugas pembantuan berdasarkan tugas tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep akan menjelaskan laporan capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan IVsesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada Renja.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia serta tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;.
2. perumusan kebijakan dan penetapan rencana program dan kegiatan Badan;
3. penyelenggaraan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi kepegawaian;
4. penyelenggaraan penilaian kinerja aparatur, pembinaan, penghargaan, dan kesejahteraan pegawai;
5. penyelenggaraan mutasi, promosi, pengembangan karier dan pengembangan kompetensi aparatur;
6. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan profesi ASN;
7. pelaksanaan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan kegiatan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

1.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Kualitas Kinerja pemerintah daerah perlu untuk ditingkatkan baik dari sisi mental dan etos kerja birokratnya, manajemen kelembagaan dan infrastruktur penunjangnya. Peningkatan etos kerja birokrat dapat dilakukan melalui penerapan disiplin pegawai dan peningkatan kinerja, manajemen kelembagaan dapat ditingkatkan melalui pembenahan tata laksana organisasi sedangkan penguatan infrastruktur pemerintahan dan pelayanan dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi informasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka isu-isu strategis yang harus ditangani Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 secara berkesinambungan untuk mendukung isu strategis daerah yaitu :

1. Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN;
2. Belum terintegrasinya Sistem Informasi Kepegawaian di Pemkab Sumenep dengan Data Kepegawaian Pusat di BKN;
3. Belum optimalnya penerapan Sistem Merit di Kabupaten Sumenep;
4. Belum optimalnya Evaluasi Kinerja ASN berbasis sistem informasi;

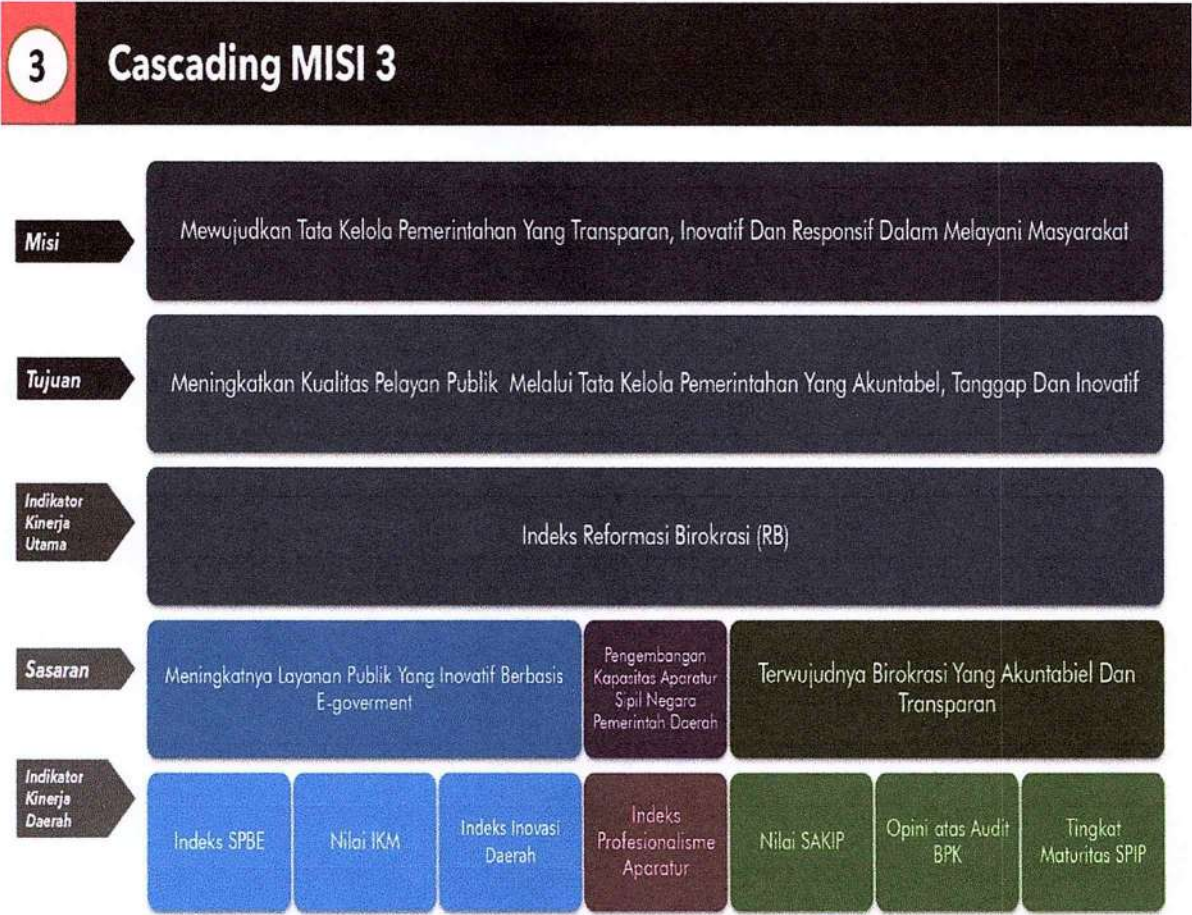
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep pada pembangunan Kabupaten Sumenep dengan merujuk terhadap RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Visi Pemerintah Kabupaten Sumenep berpedoman pada arah pembangunan Kabupaten Sumenep sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah “**Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera**” yang diwujudkan melalui 5 (lima) Misi, yaitu :

1. Membangun kualitas sumber daya manusia berdaya saing bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis kawasan dari hulu ke hilir.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan responsif dalam melayani masyarakat.
4. Melaksanakan pembangunan berazas gotong royong dan kearifan lokal.
5. Memperkuat pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan hidup yang berimbang antara daratan dan kepulauan.

Sebagai upaya untuk mencapai Misi 3 yakni “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat**”, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut : **Meningkatkan Kualitas Pelayan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap dan Inovatif**, dengan sasaran :

1. Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-government;
2. Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah;
3. Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan.

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi 3 RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan sebagai berikut:



Berdasarkan Matrik *Logical Framework* diatas maka Sasaran Kedua Misi Ketiga RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 yaitu **Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah** dengan Indikator Sasaran **Indeks Profesionalisme Aparatur** menjadi Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Aparatur yang lebih bersih, profesional dan sejahtera Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep berupaya menyelenggarakan pelayanan manajemen kepegawaian yang berkualitas, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut :

Tujuan Strategis Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan Misi Kepala Daerah. Untuk periode 2021-2026 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep menetapkan Tujuan sebagai berikut :

Tujuan 1 “Terwujudnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah”.

Melalui tujuan ini Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep melakukan upaya-upaya untuk menciptakan aparatur sipil negara pemerintah daerah yang profesional. Pencapaian tujuan pertama ini akan diukur dengan indikator kinerja **“Indeks Profesionalitas ASN”** yang merupakan gambaran profesionalitas seluruh aparatur sipil negara di Kabupaten Sumenep.

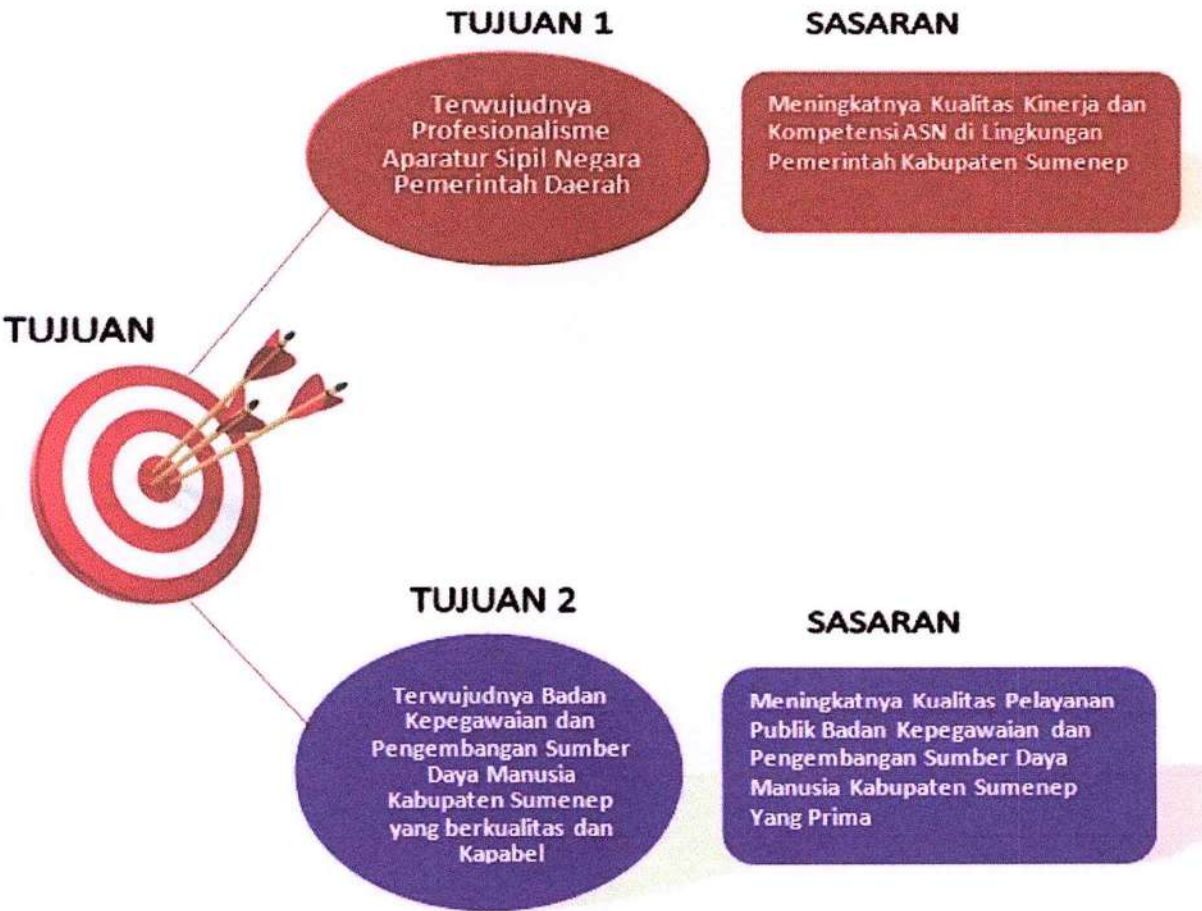
Tujuan 2 “Terwujudnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep yang berkualitas dan Kapabel”

Tujuan yang kedua ini diarahkan untuk pembangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ke dalam atau internal, agar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep sebagai salah satu perangkat daerah juga dapat mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Sumenep yaitu mewujudkan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel, tanggap dan inovatif. Pencapaian tujuan kedua ini akan diukur melalui indikator kinerja **“Nilai Implementasi SAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep”** yang merupakan cerminan pencapaian dari Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep yang diinginkan dapat dicapai secara nyata oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep menjabarkan 2 (dua) tujuan kedalam 2 (dua) sasaran strategis.

Sasaran Strategis tersebut kemudian dilengkapi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.

Keterkaitan antara Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dengan Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep digambarkan dalam gambar dibawah ini.



1.4. Dasar Hukum

Sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan “Rencana Strategis” sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

-
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 10) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
 - 11) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

-
- 13) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 14) Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 - 16) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 17) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - 18) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 107 Tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Rencana strategis adalah rencana spesifik mengenai bagaimana untuk mencapai ke arah masa depan yang akan diambil oleh entitas. Sedangkan Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan kesetiap program jangka panjang selama beberapa tahun kedepan. Hasil dari proses perencanaan strategi berupa dokumen yang dinamakan strategik plan yang berisi informasi tentang program-program beberapa tahun yang akan datang. Dengan adanya perencanaan strategis ini maka konsepsi organisasi menjadi jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana-rencana lain dan dapat mengarahkan sumber-sumber organisasi secara efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan strategi dapat menentukan keberhasilan organisasi.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dengan ringkasan sebagaimana dibawah ini :



SASARAN
Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Kompetensi ASN di Lingkungan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik BKPSDM Kabupaten Sumenep Yang Prima
↓
INDIKATOR SASARAN
Indeks Penilaian Sistem Merit
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat BKPSDM Kabupaten Sumenep

Dari pemaparan diatas sekarang akan kita jabarkan indikator sasaran yang mengarah pada pencapaian target OPD sebagai berikut :

SASARAN 1 :

Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Kompetensi ASN di Lingkungan dengan indikator kinerja yaitu ***“Indeks Penilaian Sistem Merit”***

SASARAN 2 :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Yang Prima dengan indikator kinerja yaitu ***“Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep”***

2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/OPD/Unit kerja mandiri sekurang kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Berikut ini Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep yang ada di muat dalam RPJMD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja BKPSDM
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Profesionalisme Aparatur	55	60	62	64	66	68	70	70
2	Indeks Penilaian Sistem Merit	NA	40	45	50	55	60	65	65
3	SAKIP Perangkat Daerah	89,80	89,80	89,85	89,90	89,95	89,98	90	90
4	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	80	90	91	92	93	94	95	95

Untuk mencapai sasaran RPJMD maka diperlukan indikator yang mengacu pada pencapaian target dan sasaran RPJMD tersebut diatas. Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BKPSDM Kabupaten Sumenep Nomor : 188/31/KEP/435.203.1/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kepagawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Badan Kepagawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tujuan/ Sasaran
Terwujudnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah		Indeks Profesionalisme Aparatur	62
	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep	Indeks Penilaian Sistem Merit	45
Terwujudnya BKPSDM Kabupaten Sumenep yang berkualitas dan Kapabel		Nilai Implementasi SAKIP BKPSDM Kabupaten Sumenep	89,85
	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	91

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi bersangkutan. Secara berjenjang semua Pejabat Struktural dilingkungan Badan Kepagawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep telah membuat dan menandatangani perjanjian kinerja tahun 2022. Kepala Badan Kepagawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pejabat Tinggi Pratama) telah membuat dan menandatangani perjanjian kinerja dengan Bupati Sumenep sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepagawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep	Indeks Penilaian Sistem Merit	45
	1.1 Meningkatnya Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian	45
	1.2 Meningkatnya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial, fungsional, formal dan non formal	40
2	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	91
	2.1 Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sumenep pada Triwulan I terialisasi sebagai berikut :

(1)	
TUJUAN 1 : Terwujudnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah	
NDIKATOR KINERJA : Indeks Profesionalitas ASN	
TARGET KINERJA	62.00
CAPAIAN KINERJA	43.45

Capaian kinerja pada indikator **Indeks Profesionalisme ASN** pada Triwulan I Tahun 2022 Target Nilai 62.00 dan terialisasi dengan Nilai **43.45**.

(2)	
TUJUAN 2 : Terwujudnya BKPSDM Kabupaten Sumenep yang berkualitas dan Kapabel	
INDIKATOR KINERJA : Nilai Implementasi SAKIP BKPSDM Kabupaten Sumenep	
TARGET KINERJA	89.85
CAPAIAN KINERJA	89.88

Capaian kinerja pada indikator **Nilai Implementasi SAKIP BKPSDM Kabupaten Sumenep** pada tahun 2021 terialisasi **89.88** dan pada tahun 2022 masih **belum terialisasi** pada triwulan I menunggu hasil penilaian dari bagian Organisasi Setda Kabupaten Sumenep.

(3)	
SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep	
INDIKATOR KINERJA : Indeks Penilaian Sistem Merit	
TARGET KINERJA	45.00
CAPAIAN KINERJA	51.63

Capaian kinerja pada indikator **Indeks Penilaian Sistem Merit** pada tahun 2021 terialisasi 45.38 dan pada triwulan I (satu) tahun 2022 terialisasi **51.63**.

(4)	
SASARAN 2 : Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	
NDIKATOR KINERJA : Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	
TARGET KINERJA	91,00
CAPAIAN KINERJA	46.01

Capaian kinerja pada indikator **Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah** pada triwulan I (satu) terialisasi sebesar **46.01**.

(5)	
SASARAN 3: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik BKPSDM Kabupaten Sumenep Yang Prima	
NDIKATOR KINERJA : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat BKPSDM Kabupaten Sumenep	
TARGET KINERJA	88.30
CAPAIAN KINERJA	-

Capaian kinerja pada indikator **Nilai Survei Kepuasan Masyarakat BKPSDM Kabupaten Sumenep** pada triwulan I (satu) belum terialisasi.

3.2. Pengukuran Kinerja atas Perjanjian Kinerja

Pengukuran kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sumenep dengan menggunakan dasar Perjanjian Kinerja. Adapun hasil Pengukuran indikator kinerja sampai dengan Triwulan Satu adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi TRW- I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep	Indeks Penilaian Sistem Merit	45.00	51.63
	1.1 Meningkatnya Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian	45.00	51.63
	1.2 Meningkatnya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial, fungsional, formal dan non formal	40.00	Belum Terialisasi
2	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	91.00	46.01
	2.1 Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	23,53%

Tabel 3.2
Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan I Tahun 2022

SEKRETARIAT

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	3	60,00%
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	Laporan	3	3	100,00%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	5	2	40,00%
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi gaji dan tunjangannya	ASN	77	77	100,00%
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun sesuai ketentuan	Dokumen	2	1	50,00%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	31	4	12,90%
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	Jenis	17	3	17,65%
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	75	12	16,00%
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis ATK yang disediakan	Jenis	38	4	10,53%
-		Jumlah Makan dan minum yang disediakan	Orang	75		0,00%
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Tahun	1		0,00%
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jenis	17	3	17,65%
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Kali	113	4	3,54%
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa	3	1	33,33%
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa pengantar surat	Kali	264	38	14,39%
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	Bulan	12	3	25,00%
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga outsorcing yang disediakan	Orang	22	22	100,00%
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	Unit	255		0,00%
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dikelola	Unit	13	2	15,38%
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Yang Dipelihara (BKPSDM dan SKD)	Gedung	2		0,00%
CAPAIAN KINERJA				731	172	23,53%

PPI

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	%	90		0,00%
-	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Kebutuhan Formasi (CPNS dan PPPK) yang disusun tepat waktu	Dokumen	2		0,00%
-	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Pengadaan ASN	Orang	350		0,00%
-	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah ASN yang mengurus administrasi pemberhentiannya	ASN	350	445	127,14%
-	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	ASN	40	3	7,50%
-	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang di update	Aplikasi	3	3	100,00%
-	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah ASN Yang Tersedia Datanya Update dan Valid	ASN	4.500	3.500	77,78%
CAPAIAN KINERJA				5.245	3.951	75,33%

PKAP

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Prosentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	%	90		0,00%
-	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tercapainya Penilaian Kinerja dan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	ASN	8.656		0,00%
-	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen hasil evaluasi disusun	Dokumen	1		0,00%
-	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	ASN	660	59	8,94%
-	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah Pemberian Tanda Jasa bagi Pegawai	Orang	150		0,00%
-	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN diberikan Pembinaan Disiplin	ASN	8.756		0,00%
-	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kasus	30	2	6,67%
-	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kasus	30	2	6,67%
-	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah ASN yang dilakukan Evaluasi Disiplin	ASN	8.756		0,00%
CAPAIAN KINERJA				27.039	63	0,23%

PKA

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	ASN	160		0,00%
-	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Ijin Belajar dan Tugas Belajar Yang diterbitkan	Dokumen	125		0,00%
-	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Peserta Diklat Fungsional bagi PNS Daerah	Orang	40	8	20,00%
2	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis ASN	Dokumen	2		0,00%
-	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Data Analisa Kebutuhan Diklat dan Pengembangan Kompetensi OPD	Dokumen	2		0,00%
3	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Dokumen	2		0,00%
-	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah Pejabat Pengawas yang mengikuti Manajemen Talent	Orang	72		0,00%
-	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Lulus Diklat Kepemimpinan dan Latsar	Orang	74		0,00%
-	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi bagi ASN	Dokumen	1		0,00%
CAPAIAN KINERJA				314	8	2,55%

MUTASI DAN PROMOSI

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Mutasi dan Promosi ASN	ASN	1.000		0,00%
-	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN dalam Penataan, Pengelolaan, Penempatan, Pengangkatan dan Mutasi	ASN	500	713	142,60%
-	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK kenaikan pangkat yang terealisasi dan tepat waktu	SK	2.600		0,00%
-	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan karir	ASN	50	32	64,00%
CAPAIAN KINERJA				3.150	745	23,65%

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan data realisasi keuangan yang ada pada Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Triwulan I Tahun Anggaran 2022 dapat dipaparkan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Anggaran dan Reaslisasi Triwulan I Tahun 2022

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.962.123.936	1.290.372.739	7.671.751.197	14,40%
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.677.663.885	188.799.441	1.488.864.444	11,25%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.073.133.570	16.883.070	1.056.250.500	1,57%
TOTAL		11.712.921.391	1.496.055.250	10.216.866.141	12,77%

Berdasarkan data tersebut diatas, maka realisasi keuangan Triwulan I secara keseluruhan baru mencapai sebesar **Rp. 1.496.055.250,-** atau **12,77%** dari target sebesar **Rp. 11.712.921.391** Walaupun sebenarnya realiasi keuangan lebih besar dari data tersebut, tetapi karena sistem pembayaran belanja menggunakan Uang Persediaan (UP) dan UP tersebut belum di SPJ kan dengan menerbitkan SP2D-GU, maka semua pembayaran yang menggunakan UP belum dapat tercatat diaplikasi laporan keuangan secara otomatis, sehingga data realisasi keuangan secara riil akan berbeda dengan data yang tercatat pada aplikasi Simda Keuangan.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan data capaian indikator kinerja utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep, maka pada Triwulan I Tahun 2022 belum semua indikator kinerja utama dapat direalisasikan, karena belum semua kegiatan dapat dilaksanakan di Triwulan I. Adapun realisasi capaian indikator kinerja utama dan Indikator Kinerja Sasaran adalah :

1. Indeks Profesionalisme Aparatur

Capaian Kinerja pada **Indeks Profesionalisme Aparatur** pada Triwulan I Tahun 2022 teralisasi **43.45** dari Target Kinerja yang harus dicapai adalah **62.00**.

2. Nilai Implementasi SAKIP BKPSDM Kabupaten Sumenep

Pada Triwulan I Tahun 2022 belum terlaksana/belum tercapai. Menunggu hasil dari penilaian SAKIP dari bagian Organisasi Setda Kabupaten Sumenep. Target Kinerja yang harus dicapai adalah Nilai **89,85**.

3. Indeks Penilaian Sistem Merit

Pada Triwulan I Tahun 2022 teralisasi sebesar **51.63** sebesar dari Target Kinerja yang harus dicapai adalah Nilai **45.00**

4. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pada Triwulan I Tahun 2022 teralisasi sebesar **46.01** dari Target Kinerja yang harus dicapai **91.00**.

5. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat BKPSDM Kabupaten Sumenep

Pada Triwulan I Tahun 2022 belum terlaksana/belum tercapai dan Target Kinerja yang harus dicapai adalah Nilai **88.30**.

6. Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial, fungsional, formal dan non formal

Pada Triwulan I Tahun 2022 belum terlaksana/belum tercapai dan Target Kinerja yang harus dicapai adalah **40.00**.

7. Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor

Capaian Kinerja Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor pada Triwulan I Tahun 2022 teralisasi **23,53%**. dan Target Kinerja yang harus dicapai adalah **100%**.

Untuk realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I baru mencapai sebesar **Rp. 1.496.055.250,-** atau **12,77%** dari target sebesar **Rp. 11.712.921.391,-**

SEKRETARIAT
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TRIWULAN - I (SATU)
TAHUN 2022

INSTANSI : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Formulir PKK

No	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	JAN	FEB	MAR	REALISASI JAN-MAR	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	TRIWULAN - I							PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KET.		
												KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	JAN	FEB	MAR	REALISASI JAN-MAR				
1	2	3		4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	26	36	37	38		
1		Pendapatan SKD			30.000.000	0	0	0	0	0,00%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
	Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	%	100	10,67	3,15	9,71	23,53	23,53%												
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5				3	3		60,00%	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	4.032.650	-	-	2.285.500	2.285.500	56,67%	
		Keluaran Sub	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai kelentuan	Laporan	3				3	3		100,00%	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	4.032.650			2.285.500	2.285.500	56,67%	
2	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	5				2	2	40,00%	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	7.960.828.481	279.178.262	324.585.047	529.568.356	1.133.331.665	14,24%		
		Keluaran Sub	Jumlah ASN yang terpenuhi gaji dan tunjangan	ASN	77	77				77	100,00%	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	7.953.866.181	279.178.262	324.585.047	528.238.856	1.132.002.165	14,23%		
3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun sesuai kelentuan	Dokumen	2				1	1	50,00%	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	6.962.300			1.329.500	1.329.500	19,10%		
		Keluaran	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	31				4	4	12,90%	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	236.057.528	-	744.000	24.495.283	25.239.283	10,69%		
		Keluaran Sub	Jumlah jenis/tem komponen instalasi listrik yang disediakan	Jenis	17				3	3	17,65%	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	35.353.900			5.979.100	5.979.100	16,91%		
		Keluaran Sub	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Unit	75				12	12	16,00%	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	49.951.278			8.170.500	8.170.500	16,36%		
		Keluaran Sub	Jumlah Jenis ATK yang disediakan	Jenis	38				4	4	10,53%	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	68.791.850		744.000	2.700.000	3.444.000	5,01%		
			Jumlah Makan dan minum yang disediakan	Orang	75						0	0,00%										
		Keluaran Sub	Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Tahun	1						0	0,00%	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	19.267.500			4.815.600	4.815.600	24,99%	
		Keluaran Sub	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jenis	17				3	3	17,65%	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	12.719.000			470.000	470.000	3,70%		
		Keluaran Sub	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Kali	113				4	4	3,54%	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	49.974.000			2.360.083	2.360.083	4,72%		
4	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pelayanan	Keluaran	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa	3			1	1	33,33%	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	669.327.926	14.490.258	58.146.456	48.870.083	121.506.797	18,15%			
		Keluaran Sub	Jumlah Jasa pengantar surat	Kali	264				38	38	14,39%	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	11.368.400		515.000	1.121.000	1.636.000	14,39%		
		Keluaran Sub	Jumlah Taghan Listrik, Ar, Telepon dan Internet	Bulan	12	1	1	1	1	3	25,00%	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	238.884.672	14.490.258	23.288.626	13.406.253	51.185.137	21,43%		
		Keluaran Sub	Jumlah tenaga outsorching yang disediakan	Orang	22			22		22	100,00%	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	419.074.854		34.342.830	34.342.830	68.685.660	16,39%		

No	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	JAN	FEB	MAR	REALISASI JAN-MAR	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	TRIWULAN - I						PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KET.	
												KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	JAN	FEB	MAR			REALISASI JAN-MAR
1	2	3		4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	26	36	37	38
5	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Keluaran	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	Unit	255				0	0%		5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	91.877.351	-	-	8.009.494	8.009.494	8,72%	
		Keluaran Sub	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dikelola	Unit	13			2	2	15,38%		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	47.450.000			8.009.494	8.009.494	16,88%	
		Keluaran Sub	Jumlah Bangunan Gedung Yang Dipelihara (BKPSDM dan SKD)	Gedung	2				0	0,00%		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	44.427.351				0	0,00%	
		REALISASI KINERJA			731	78	23	71	172	23,53%		REALISASI ANGGARAN		8.962.123.936	293.668.520	383.475.503	613.228.716	1.290.372.739	14,40%	

Sumenep, 15 Maret 2022

SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUMENEP


NURUL JAMIL S. Sosa, M.Si
Pembina Tinokat I
NIP. 19680325 199003 1 005

BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TRIWULAN - I (SATU)
TAHUN 2022

INSTANSI : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Formulir PKK

No	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	JAN	FEB	MAR	REALISASI JAN-MAR	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	TRIWULAN - I							PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KET.	
												KEGIATAN		SATUAN	TARGET	JAN	FEB	MAR			REALISASI JAN-MAR
1	2	3		4	5	6	7	8	18	19	20	21		22	23	24	25	26	36	37	38
1	Meningkatnya Program Kepegawaian Daerah	Hasil	Persentase Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian	%	45					0,00%	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH										
	Meningkatnya Kualitas perencanaan pegawai dan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi	Keluaran	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawian	%	90					0,00%		1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp	903.272.425	-	-	72.432.151	72.432.151	8,02%	
		Keluaran Sub	Jumlah Dokumen Kebutuhan Formasi (CPNS dan PPPK) yang disusun tepat waktu	Dokumen	2				0	0,00%			- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Rp	29.003.900			10.581.000	10.581.000	36,48%	
		Keluaran Sub	Jumlah Pengadaan ASN	Orang	350				0	0,00%			- Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Rp	676.948.725			38.866.800	38.866.800	5,74%	
		Keluaran Sub	Jumlah ASN yang diurus administrasi pemberhentiannya	ASN	350		234	211	445	127,14%			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Rp	59.295.000			424.000	424.000	0,72%	
		Keluaran Sub	Jumlah ASN yang mengikut Fasilitas Lembaga Profesi ASN	ASN	40			3	3	7,50%			- Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Rp	28.794.800			4.455.000	4.455.000	15,47%	
		Keluaran Sub	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang di update	Aplikasi	3			3	3	100,00%			- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp	53.945.000			16.114.351	16.114.351	29,87%	
		Keluaran Sub	Jumlah ASN Yang Tersedia Datanya Update dan Valid	ASN	4.500			3.500	3.500	77,78%			- Pengelolaan Data Kepegawaian	Rp	55.285.000			1.991.000	1.991.000	3,60%	
		REALISASI KINERJA			5.245	0	234	3.717	3.951	75,33%				903.272.425	0	0	72.432.151	72.432.151	8,02%		

Ket :
Jan 8.705
Feb 8.643
Maret 9.236
Jumlah Pegawai dilingkungan Pemkab Sumenep Pada Bulan Maret sebanyak 9.236 ASN

Sumenep, 15 Maret 2022
KEPALA BIDANG DATA DAN INFORMASI PEGAWAI


Ibra YANDA MARDIANA
Pembina
NIP. 19680414 199403 2 007

BIDANG MUTASI DAN PROMOSI
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TRIWULAN - I (SATU)
TAHUN 2022

INSTANSI : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Formulir PKK

No	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	JAN	FEB	MAR	REALISASI JAN-MAR	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	TRIWULAN - I							PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KET.	
												KEGIATAN	SATUAN	TARGET	JAN	FEB	MAR	REALISASI JAN-MAR			
1	2	3		4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	26	36	37	38	
1	Meningkatnya Program Kepegawaian Daerah	Hasil	Persentase Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian	%	45					0%	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2									
	Meningkatnya Pelayanan Mutasi dan Promosi ASN	Keluaran	Jumlah Mutasi dan Promosi ASN	ASN	1.000					0%			Mutasi dan Promosi ASN	Rp	209.407.600	-	27.000.000	39.454.146	66.454.146	31,73%	
		Keluaran Sub	Jumlah ASN dalam Penataan, Pengelolaan, Penempatan, Pengangkatan dan Mutasi	ASN	500		468	245	713	143%			- Pengelolaan Mutasi ASN	Rp	81.132.000		27.000.000	3.940.400	30.940.400	38,14%	
		Keluaran Sub	Jumlah SK kenaikan pangkat yang terealisasi dan tepat waktu	SK	2.600				0	0%			- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Rp	43.786.500				0	0,00%	
		Keluaran Sub	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan karir	ASN	50		32		32	64%			- Pengelolaan Promosi ASN	Rp	84.489.100			35.513.746	35.513.746	42,03%	
		REALISASI KINERJA			3.150	0	500	245	745	23,65%		REALISASI ANGGARAN		209.407.600	0	27.000.000	39.454.146	66.454.146	31,73%		

Sumenep, 15 Maret 2022
KEPALA BIDANG MUTASI


D. MUHAMMAD SUHARJONO, SH, MH
Penata
NIP. 19690118 200701 1 011

BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TRIWULAN - I (SATU)
TAHUN 2022

INSTANSI : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Formulir PKK

No	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	JAN	FEB	MAR	REALISASI JAN-MAR	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	TRIWULAN - I							PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KET.				
												KEGIATAN	SATUAN	TARGET	JAN	FEB	MAR	REALISASI JAN-MAR						
1	2	3		4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	26	36	37	38				
1	Meningkatnya Program Kepegawaian Daerah	Hasil	Persentase Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian	%	45					0,00%	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1												
			Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	%	60					0,00%														
			Persentase Nilai SKP yang baik	%	80					0,00%														
			Persentase Jumlah pelanggaran disiplin ASN	%	0,20					0,00%														
	Meningkatnya Kualitas Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Keluaran	Prosentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	%	90					0,00%					Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp	184.467.790	-	-	16.334.694	16.334.694	8,86%		
		Keluaran Sub	Tercapainya Penilaian Kinerja dan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	ASN	8.656					0			0,00%			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp	24.791.150			3.347.550	3.347.550	13,50%	
		Keluaran Sub	Jumlah Dokumen hasil evaluasi disusun	Dokumen	1					0			0,00%			Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp	38.277.000			550.000	550.000	1,44%	
		Keluaran Sub	Jumlah Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	ASN	660			12	47	59			8,94%			Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Rp	17.763.500			2.372.500	2.372.500	13,36%	
		Keluaran Sub	Jumlah Pemberian Tanda Jasa bagi Pegawai	Orang	150					0			0,00%			Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Rp	34.652.630			0	0	0,00%	
		Keluaran Sub	Jumlah ASN diberikan Pembinaan Disiplin	ASN	8.756					0			0,00%			Pembinaan Disiplin ASN	Rp	7.443.910			1.073.600	1.073.600	14,42%	
		Keluaran Sub	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kasus	30				2	2			6,67%			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rp	43.008.500			4.828.294	4.828.294	11,23%	
		Keluaran Sub	Jumlah Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kasus	30				2	2			6,67%			Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Rp	13.763.100			2.682.550	2.682.550	19,49%	
		Keluaran Sub	Jumlah ASN yang dituliskan Evaluasi Disiplin	ASN	8.756					0			0,00%			Evaluasi Disiplin ASN	Rp	4.768.000			1.480.200	1.480.200	31,04%	
		REALISASI KINERJA					27.039	0	12	51			63	0,23%		REALISASI ANGGARAN					184.467.790	0	0	16.334.694

Sumenep, 15 Maret 2022
KEPALA BIDANG PENILAIAN KINERJA
APARATUR DAN PENGHARGAAN

MIFTAHOL ARIFIN, SE
 Penata Tingkat I
 NIP. 19701005 199703 1 008

TAHUN 2022

Formulir PKK

No	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	JAN	FEB	MAR	REALISASI JAN-MAR	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	TROWULAN - I							PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KET.	
												KEGIATAN	SATUAN	TARGET	JAN	FEB	MAR	REALISASI JAN-MAR			
1	2	3		4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	26	36	37	38	
1	Meningkatnya Program Kepegawaian Daerah	Hasil	Persentase Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian	%	45					0%	Program Kepegawaian Daerah										
	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kompetensi ASN	Keluaran	Jumlah ASN Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi ASN	ASN	160					0%		Pengembangan Kompetensi ASN	Rp	380.516.070	0	21.375.000	12.203.450	33.578.450	8,82%		
		Keluaran Sub	Jumlah Ijin Belajar dan Tugas Belajar Yang diterbitkan	Dokumen	125					0		0%	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Rp	21.916.120				0	0,00%	
		Keluaran Sub	Jumlah Peserta Diklat Fungsional bagi PNS Daerah	Orang	40	1		7	8	20%		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Rp	358.599.950		21.375.000	12.203.450	33.578.450	9,36%		
2	Meningkatnya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Hasil	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial, fungsional, formal dan non formal	%	40					0%	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia										
	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kompetensi Teknis ASN	Keluaran	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis ASN	Dokumen	2					0%		Pengembangan Kompetensi Teknis	Rp	31.682.760	0	0	0	0	0,00%		
		Keluaran Sub	Jumlah Data Analise Kebutuhan Diklat dan Pengembangan Kompetensi OPD	Dokumen	2					0%		Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	31.692.760				0	0,00%		
	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Keluaran	Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan,Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Dokumen	2					0%		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rp	1.041.440.810	0	0	16.883.070	16.883.070	1,62%		
		Keluaran Sub	Jumlah Pejabat Pengawas yang mengikuti Manajemen Talent	Orang	72					0		0%	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertjabatan Fungsional	Rp	262.270.150				0	0,00%	
		Keluaran Sub	Jumlah ASN yang Lulus Diklat Kepemimpinan dan Letsar	Orang	74					0		0%	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Rp	752.312.000		16.883.070	16.883.070	2,24%		
			Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Dasar (LATSAR)	Orang	62				0	0%											
			Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Orang	8				0	0%											
			Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II	Orang	2				0	0%											
		Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Orang	2					0	0%											

No	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	JAN	FEB	MAR	REALISASI JAN-MAR	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	TRIWULAN - I							PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KET.
												KEGIATAN	SATUAN	TARGET	JAN	FEB	MAR	REALISASI JAN-MAR		
1	2	3		4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	26	36	37	38
		Keluaran Sub	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi bagi ASN	Dokumen	1				0	0%		- Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prejabatan	Rp	26.858.660				0	0,00%	
		REALISASI KINERJA			314	1	0	7	8	2,55%		REALISASI ANGGARAN		1.453.649.640	0	21.375.000	29.086.520	50.461.520	3,47%	

Sumenep, 15 Maret 2022
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR


WIJAYA SAPUTRA, ST, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19780116 200801 1 010